

ID P-EKONOMI-13

PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2018-2020

Yusi Yusianto

Jurusan Manajemen, Universitas Tarumanagara, Jakarta
yusiy@fe.untar.ac.id

ABSTRAK

Pandemi covid-19 menyebabkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia, mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 menjadi negatif, yakni, $-0,27\%$. Kinerja ekonomi tersebut juga mempengaruhi pasar tenaga kerja dan kemiskinan di Indonesia. Tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat pada tahun 2020. Namun, tulisan ini menganggap pengumuman pemerintah Republik Indonesia yang mengumumkan resesi pada kuartal III tahun 2020 adalah terlambat dan tidak berdampak pada persepsi publik karena resesi sudah dirasakan oleh mereka sebelum pemerintah mengumumkannya.

Kata Kunci: pandemi, pertumbuhan, tenaga kerja, kemiskinan

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has caused the world economy, including Indonesia, to experience a recession. Indonesia's economic growth in 2020 was negative, namely, -0.27% . This economic performance also affects the labor market and poverty in Indonesia. Unemployment and poverty rates increased in 2020. However, this paper considers that the Republic of Indonesia's government announcing a recession in the third quarter of 2020 is too late and has no impact on public perception because they already felt the recession before the government announced it.

Keywords: pandemic, growth, labor, poverty

1. PENDAHULUAN

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2020), Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*. PP tersebut membatasi kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* sebagai upaya untuk mencegah penyebaran ke wilayah atau penduduk lainnya. Dalam PP tersebut, PSBB minimal meliputi, antara lain, meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Meskipun PP tersebut dikeluarkan pada akhir bulan Maret 2020, sesungguhnya, praktik PSBB secara informal (dengan menggunakan berbagai nama) mulai dilakukan di berbagai daerah di Indonesia sejak awal bulan Maret 2020. Hal tersebut dilakukan oleh kepala daerah – kepala daerah tersebut ketika penduduk di wilayahnya sudah ada yang terkena *Covid-19*. Dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut langsung menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi penduduknya.

Dalam ilmu ekonomi, aktivitas ekonomi masyarakat dapat dilihat melalui data pertumbuhan ekonomi. Secara teknis, pertumbuhan ekonomi merupakan persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu tahun atau periode terhadap PDB tahun atau periode sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan PDB. Menurut definisinya, PDB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu

periode atau tahun (Parkin, 2016). Mengacu pada definisi standar tersebut, maka dapat diduga bahwa kebijakan PSBB tersebut akan berdampak pada PDB dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan melambat, bahkan mungkin mengalami pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dapat menjadi negatif terjadi apabila nilai PDB tahun 2020 lebih rendah daripada nilai PDB tahun 2019. Tulisan ini akan melihat perkembangan PDB Indonesia pada tahun 2020.

2. METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif (*descriptive quantitative research*), yang dirancang untuk mengidentifikasi karakteristik fenomena perkembangan ekonomi, khususnya mengenai produk domestik bruto, ketenagakerjaan dan kemiskinan & ketimpangan, yang berlangsung dari tahun 2018 hingga 2020.

Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan dan kemiskinan & ketimpangan untuk periode 2018-2020.

Formula

Beberapa formula yang digunakan dalam mengidentifikasi perkembangan data PDB, ketenagakerjaan dan kemiskinan, antara lain:

Distribusi PDB:

$$\text{Distribusi PDB} = \frac{PDB_i}{PDB_T} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

- PDB_i = PDB (atau nilai tambah) sektor i
- PDB_T = Total PDB Indonesia
- i = sektor atau lapangan usaha

Pertumbuhan PDB (sektoral dan total):

$$\text{Pertumbuhan PDB}_{t_1-t_0} = \frac{PDB_{t_1} - PDB_{t_0}}{PDB_{t_0}} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan:

- PDB_{t_0} = PDB tahun awal
- PDB_{t_1} = PDB tahun berikutnya
- $\text{Pertumbuhan PDB}_{t_1-t_0}$ = Pertumbuhan PDB periode t_0 sampai t_1

Deflator PDB (untuk sektoral dan total):

$$\text{Deflator PDB} = \frac{PDB_{\text{Harga Berlaku}}}{PDB_{\text{Harga Konstan}}} \times 100 \quad (3)$$

Keterangan:

- $PDB_{\text{Harga Berlaku}}$ = PDB pada harga berlaku
- $PDB_{\text{Harga Konstan}}$ = PDB pada harga konstan

Inflasi (berdasarkan pengukuran deflator PDB):

$$\text{Inflasi}_{t_0-t_1} = \frac{\text{Deflator PDB}_{t_1} - \text{Deflator PDB}_{t_0}}{\text{Deflator PDB}_{t_0}} \times 100\% \quad (4)$$

Keterangan:

- $\text{Inflasi}_{t_0-t_1}$ = inflasi dari tahun t_0 ke t_1
- $\text{Deflator PDB}_{t_0}$ = Deflator PDB tahun t_0
- $\text{Deflator PDB}_{t_1}$ = Deflator PDB tahun t_1

Sumber Pertumbuhan PDB (sektoral):

$$\text{Sumber pertumbuhan}_{i,t_0-t_1} = \left(\frac{PDB_i}{PDB_T} \right)_{t_0} \times \text{pertumbuhan ekonomi}_{i,t_0-t_1} \times 100\% \quad (5)$$

Keterangan:

- Sumber pertumbuhan $_{i,t_0-t_1}$ = sumber pertumbuhan sektor i , periode t_0-t_1
- $\left(\frac{PDB_i}{PDB_T} \right)_{t_0}$ = distribusi persentase PDB sektor i , tahun t_0
- Pertumbuhan ekonomi $_{i,t_0-t_1}$ = pertumbuhan ekonomi sektor i , periode t_0-t_1

Rumus nomor (1) dan (2) dapat diterapkan pada data ketenagakerjaan.

Beberapa istilah yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan (BPS, 2021):

- a. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).
- b. Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah GK dibagi jumlah penduduk.
- c. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.

- d. Indeks keparahan kemiskinan adalah penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi, nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.
- e. *Gini ratio* adalah salah satu indikator ketimpangan pengeluaran. Nilai Gini ratio berkisar antara 0 (sangat merata) dan 1 (sangat timpang).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 adalah 5,02% dan tahun 2020 adalah - 2,07% (tabel 1). Pada tahun 2019, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Di mana tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi adalah, antara lain, jasa; transportasi & pergudangan; dan konstruksi. Dari pertumbuhan ekonomi 5,02%, lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah, antara lain, jasa; industri pengolahan; perdagangan; dan konstruksi. Pada tahun 2020, hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif, kecuali di pertanian, kehutanan dan perikanan; dan jasa. Pertumbuhan negatif tertinggi adalah, antara lain, transportasi & pergudangan; perdagangan; dan konstruksi. Dari pertumbuhan ekonomi - 2,07%, kontributor pertumbuhan negatif tersebut, antara lain, transportasi & pergudangan; industri pengolahan; dan perdagangan.

Tabel 1. PDB: Pertumbuhan, Sumber Pertumbuhan, Komposisi dan Perubahan Harga (inflasi)

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi (%)		Sumber Pertumbuhan (%)		Distribusi Persentase PDB (%)			Inflasi (%)	
		2019	2020	2019	2020	2018	2019	2020	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.60	1.75	0.45	0.22	12.54	12.37	12.85	2.22	3.28
2	Pertambangan & Penggalian	1.22	(1.95)	0.09	(0.14)	7.64	7.36	7.37	(5.25)	(11.89)
3	Industri Pengolahan	3.80	(2.93)	0.80	(0.61)	21.04	20.79	20.61	1.97	1.32
4	Pengadaan Listrik, air & Gas	4.33	(1.83)	0.05	(0.02)	1.11	1.10	1.10	0.58	(0.64)
5	Konstruksi	5.75	(3.26)	0.58	(0.33)	10.05	10.12	10.00	3.00	0.39
6	Perdagangan	4.60	(3.72)	0.61	(0.49)	13.21	13.15	12.93	1.96	0.59
7	Transportasi & Pergudangan	6.41	(15.05)	0.27	(0.64)	4.18	4.23	3.67	3.85	(7.91)
8	Jasa	7.30	1.85	1.91	0.50	26.18	26.75	27.82	1.95	0.79
	Nilai Tambah Bruto atas Dasar Harga Dasar	4.96	(1.58)	4.8	(1.5)	95.9	95.9	96.4	1.60	(0.46)
	Pajak dikurang Subsidi atas Produk	6.43	(13.42)	0.26	(0.55)	4.06	4.11	3.64	1.62	(0.45)
	Produk Domestik Bruto	5.02	(2.07)	5.02	(2.07)	100.00	100.00	100.00	1.60	(0.46)

Sumber: Badan Pusat Statistik (<http://www.bps.go.id>)

Apabila dilihat dari sektornya, maka hanya ada 2 sektor yang pertumbuhan ekonominya mengalami pertumbuhan positif, yakni pertanian dan jasa. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif, yang menunjukkan upaya bertahan masyarakat atas kondisi yang dihadapinya. Masyarakat tetap membutuhkan bahan makanan, bahkan pemerintah harus mengeluarkan dananya untuk menyediakan bahan makanan bagi masyarakat yang dianggap selayaknya dibantu. Sektor jasa mengalami pertumbuhan positif, yang menunjukkan upaya bertahan masyarakat dengan cara mengalihkan aktivitas fisiknya menjadi aktivitas *online*. Aktivitas *online* tersebut membutuhkan dukungan terutama dari 2 sektor, yakni sektor yang berkaitan dengan teknologi telekomunikasi dan perbankan (keuangan).

Data distribusi PDB, dari tahun 2018 sampai 2020, urutan 5 besar yang memberi kontribusi adalah, antara lain, jasa; industri pengolahan; perdagangan; pertanian, kehutanan, perikanan; dan konstruksi. Dari semua lapangan usaha terdapat 3 lapangan usaha yang menunjukkan suatu pola. Industri pengolahan dan perdagangan cenderung menurun; sedangkan jasa cenderung meningkat.

Dari data deflator PDB, inflasi total tahun 2019 adalah 1,60%, sedangkan inflasi total tahun 2020 adalah - 0,46% (deflasi sebesar 0,46%). Hampir semua lapangan usaha, kecuali pertanian, kehutanan & perikanan, mengalami penurunan inflasi. Pertambangan & penggalian mengalami deflasi selama tahun 2019 dan 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli. Ekonomi Indonesia tahun 2020 yang sudah disertai dengan pandemic Covid-19 sejak awal bulan Maret 2020 harusnya sudah memberi peringatan bahwa ekonomi sudah mengalami resesi. Hal tersebut diperkuat oleh data PDB kuartal 2, yang mengalami kontraksi 5,32% (atau tingkat pertumbuhan ekonomi = - 5,32%). Apabila datanya ditarik lagi ke beberapa tahun sebelumnya, kesimpulan tersebut akan makin memperkuat kesimpulan tersebut. Oleh karenanya, Pemerintah tidak perlu menunggu keluarnya data PDB kuartal 3, untuk memastikan perekonomian mengalami resesi mengingat kondisinya sudah tepat untuk menggambarkan kondisi resesi. Pada masa pandemic, semua negara secara sadar atau tidak “dipaksa untuk membatasi aktivitas ekonomi dan sosial-nya” sehingga kalau pun hasil pertumbuhan ekonominya menjadi terkontraksi, itu dengan mudah dapat diprediksi. Penundaan pengumuman resesi oleh pemerintah, justru membuat data ekonomi menjadi kehilangan fungsinya sebagai *early warning system* (EWS) bagi pelaku ekonomi.

Ketenagakerjaan

Dari tahun 2018 sampai 2020, terjadi kenaikan penduduk usia kerja. Tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja, antara lain, 1,54% (2019) dan 1,38% (2020). Selama periode tersebut, angkatan kerja juga mengalami pertumbuhan, yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja, yakni 1,87% (2019) dan 1,74% (2020). Bukan angkatan kerja juga mengalami kenaikan namun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja, yakni 0,86% (2019) dan 0,64% (2020).

Dari data angkatan kerja selama periode tersebut dapat dilihat bahwa dampak pandemi covid-19 sangat terasa pada pasar tenaga kerja. Angkatan kerja yang pada tahun 2019 mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan angkatan kerja, yakni 1,96%, pada tahun 2020 mengalami tingkat pertumbuhan negatif, yakni - 0,24%. Apabila tahun 2019, jumlah angkatan kerja yang bekerja ada penambahan 2,47 juta orang, maka pada tahun 2020 terjadi penurunan angkatan kerja yang bekerja sebanyak 0,31 juta orang. Hal tersebut membuat tingkat pertumbuhan pengangguran naik dari 0,42% (2019) menjadi 37,61% (2020). Atau, kalau dalam nilai absolut, jumlah angkatan kerja yang menganggur naik dari 0,03 juta orang (2019) menjadi 2,67 juta orang (2020).

Perkembangan tersebut membuat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang naik terus dari tahun 2018 hingga 2020 disertai dengan peningkatan tingkat pengangguran pada tahun 2020, yang lebih tinggi dari tahun 2018, yakni 7,07%. Padahal tingkat pengangguran menurun dari tahun 2018 (5,30%) ke 2019 (5,23%).

Dari segi pendidikan (tabel 2), sebagian besar angkatan kerja yang bekerja (sekitar 55% - 59%) merupakan lulusan SMP dan ke bawah. Kalau melihat perkembangan komposisinya, proporsi pekerja lulusan SMP dan ke bawah cenderung menurun, dari 58,86% (2018) ke 57,17% (2020). Proporsi pekerja lulusan Diploma juga cenderung menurun. Proporsi pekerja lulusan SMA dan

SMK cenderung meningkat. Dari keduanya, pertumbuhan tenaga kerja lulusan SMA merupakan tingkat pertumbuhan yang tertinggi dari semua lulusan pendidikan lainnya. Pekerja lulusan SMK malah mengalami penurunan pada tahun 2020. Proporsi pekerja lulusan Universitas cenderung meningkat, meskipun sedikit menurun dari tahun 2019 (9,69%) ke tahun 2020 (9,62%).

Tabel 2. Tenaga Kerja Indonesia menurut Pendidikan yang Ditamatkannya

Pendidikan Tenaga Kerja	Pertumbuhan		Komposisi Pekerja		
	(persen)		(persen)		
	2019	2020	2018	2019	2020
a. Di bawah SMP	(0.11)	(1.12)	58.86	57.67	57.17
b. SMA dan SMK	5.33	1.63	28.99	29.95	30.51
c. Diploma	(1.14)	0.29	2.77	2.69	2.70
d. Universitas	5.41	(0.96)	9.38	9.69	9.62
Total	1.96	(0.24)	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS (<http://www.bps.go.id>)

Dilihat dari lapangan pekerjaan utamanya (tabel 3), urutan penyerap tenaga kerja adalah, antara lain, pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan; jasa; perdagangan; dan industri pengolahan. Keempat lapangan usaha ini menyerap tenaga kerja di atas 80% dari total tenaga kerja. Melihat perkembangannya, pekerja di pertambangan & penggalian cenderung menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pola sebaliknya terjadi pada pekerja di perdagangan yang cenderung meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pekerja sektor pertanian yang menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019, ternyata malah meningkat pada tahun 2020. Bahkan pekerja di pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun 2018. Pekerja di lapangan usaha lainnya memiliki pola yang sama, yakni naik dari tahun 2018 ke tahun 2019, namun menurun pada tahun 2020. Sedikit perbedaan di dalamnya adalah pada apakah pekerja pada tahun 2020 lebih tinggi atau lebih rendah daripada tahun 2018. Pekerja pada lapangan usaha industri pengolahan, pengadaan listrik, air & gas, dan konstruksi tahun 2020 lebih rendah daripada tahun 2018; sedangkan pekerja di lapangan usaha transportasi & pergudangan; dan jasa tahun 2020 masih lebih tinggi daripada tahun 2018.

Tabel 3. Tenaga Kerja Indonesia menurut Lapangan Usahanya

Lapangan Usaha	Pertumbuhan		Komposisi Pekerja		
	(persen)		(persen)		
	2019	2020	2018	2019	2020
a. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	(3.09)	7.84	28.97	27.53	29.76
b. Pertambangan & Penggalian	(2.72)	(5.59)	1.16	1.11	1.05
c. Industri Pengolahan	3.56	(8.96)	14.68	14.91	13.61
d. Pengadaan Listrik, Air, & Gas	4.88	(8.14)	0.65	0.67	0.62
e. Konstruksi	2.60	(7.03)	6.70	6.74	6.28
f. Perdagangan	2.98	2.24	18.58	18.76	19.23
g. Transportasi & Pergudangan	3.10	(1.24)	4.35	4.40	4.35
h. Jasa	5.88	(3.24)	24.92	25.88	25.10
Total	1.96	(0.24)	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS (<http://www.bps.go.id>)

Menurut status pekerjaan utamanya (tabel 4), urutan status pekerjaan menurut besar proporsinya adalah, antara lain, buruh/karyawan/pegawai (sekitar 36% sampai 40%); berusaha sendiri (sekitar 19% sampai 20%); berusaha dibantu buruh tidak tetap (sekitar 15%); dan pekerja keluarga (sekitar 11% sampai 14%).

Tabel 4. Tenaga Kerja Indonesia menurut Status Pekerjaan Utamanya

Status Pekerjaan	Pertumbuhan		Komposisi Pekerja		
	(persen)		(persen)		
	2019	2020	2018	2019	2020
a. Berusaha sendiri	8.29	0.15	19.11	20.29	20.37
b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	(5.77)	5.97	15.92	14.71	15.62
c. Berusaha dibantu buruh tetap	1.83	(9.19)	3.47	3.46	3.15
d. Buruh/karyawan/pegawai	4.78	(10.74)	39.55	40.65	36.37
e. Pekerja bebas di pertanian	(0.19)	12.12	4.19	4.10	4.61
f. Pekerja bebas di nonpertanian	(3.52)	5.11	5.62	5.32	5.61
g. Pekerja keluarga / tak dibayar	(3.78)	24.12	12.15	11.46	14.26
Jumlah	1.96	(0.24)	100.00	100.00	100.00
Status Pekerjaan Formal/informal					
a. Formal	4.55	(10.62)	43.02	44.11	39.53
b. Informal	-	7.95	56.98	55.89	60.47
Total	1.96	(0.24)	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS ([Http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Apabila melihat perkembangannya, maka pandemic covid-19 memberi dampak pada tenaga kerja dengan status buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap (pengusaha), tenaga kerja pada kedua status tersebut menurun pada tahun 2020. Bahkan pekerja pada kedua status tersebut lebih rendah daripada tahun 2018. Kedua status tersebut merupakan pekerja formal, di luar status tersebut merupakan pekerja informal. Dengan demikian, dampak pandemic covid-19 berdampak menurunkan pekerja berstatus formal. Sebaliknya, tenaga kerja berstatus pekerja informal mengalami kenaikan.

Dengan demikian, dampak pandemic covid-19 selain meningkatkan pengangguran juga menurunkan pekerja formal dan meningkatkan pekerja informal.

Kemiskinan & Ketimpangan

Jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun, jumlah penduduk miskin meningkat pada tahun 2020, ketika mulai mengalami pandemic covid-19 sejak awal bulan Maret 2020. Bahkan kenaikan penduduk miskin tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun 2018. Gambaran tersebut terutama terjadi pada daerah perkotaan. Pada daerah pedesaan, meskipun jumlah penduduk miskin tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun 2019, namun, masih lebih rendah daripada tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5. Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Kota (K)	Desa (D)	K+D	Kota (K)	Desa (D)	K+D	Kota (K)	Desa (D)	K+D	Kota (K)	Desa (D)	K+D
2018	10.13	15.54	25.67	6.89	13.10	9.66	1.08	2.32	1.63	0.25	0.62	0.41
2019	9.86	14.93	24.79	6.56	12.60	9.22	1.02	2.11	1.50	0.23	0.53	0.36
2020	12.04	15.51	27.55	7.88	13.20	10.19	1.26	2.39	1.75	0.31	0.68	0.47

Sumber: BPS ([Http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Gambaran persentase penduduk miskin hampir sama dengan jumlah penduduk miskin. Namun, bedanya, kenaikan persentase penduduk miskin tahun 2020 yang lebih tinggi daripada tahun 2018 dan 2019 terjadi di perkotaan dan perdesaan. Pandemi covid-19 juga membuat kondisi orang miskin menjadi lebih buruk. Hal tersebut terlihat dari indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) tahun 2020, yang lebih tinggi dari tahun 2018 dan 2019. Padahal, kedua indeks tersebut menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Kenaikan indeks P1 dan P2 yang lebih tinggi daripada tahun 2018 dan 2019 terjadi di perkotaan dan perdesaan. Artinya, semakin dalam jurang antara pengeluaran/pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan; dan semakin lebar tingkat ketimpangan yang terjadi antar orang miskin.

Gibson & Olivia (2020) menemukan bahwa dampak covid-19 pada kemiskinan tersebar secara spasial di Indonesia dan kenaikan kemiskinan yang terjadi lebih tinggi pada provinsi-provinsi yang tingkat kemiskinannya sebelumnya lebih rendah. Selain itu, Suryahadi, Al Izzati & Suryadarma (2020) memprediksi dua skenario, terbaik dan terburuk, atas kenaikan kemiskinan akibat pandemi covid-19. Prediksi terbaiknya adalah bahwa tingkat kemiskinan akan naik dari 9,2% pada bulan September 2019 menjadi 9,7% pada akhir tahun 2020. Skenario terburuknya adalah tingkat kemiskinan akan naik menjadi 16,6% pada akhir tahun 2020.

Data Gini ratio (tabel 6) menunjukkan bahwa meskipun angkanya masih di bawah 0,4, namun terjadi kenaikan tingkat ketimpangan pada tahun 2020, dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Padahal Gini ratio menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal tersebut ditunjukkan melalui tabel di bawah:

Tabel 6. Distribusi Pengeluaran Penduduk dan Gini Ratio

Tahun	Distribusi Pengeluaran Penduduk			Gini Ratio
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
2018	17.47	36.96	45.57	0.384
2019	17.71	36.93	45.36	0.380
2020	17.93	35.85	46.22	0.385

Sumber: BPS (<http://www.bps.go.id>)

Data distribusi pengeluaran menunjukkan bahwa pandemi covid-19 ini semakin menurunkan proporsi pengeluaran penduduk 40% menengah. Proporsi pengeluarannya cenderung menurun terus sejak tahun 2018, sejalan dengan kenaikan proporsi pengeluaran penduduk 40% terbawah. Apabila proporsi pengeluaran penduduk 40% menengah cenderung menurun, proporsi pengeluaran penduduk 20% teratas yang awalnya menurun dari tahun 2018 ke 2019, proporsinya meningkat pada tahun 2020. Kenaikan proporsinya malah lebih tinggi daripada tahun 2018.

Apakah Indonesia sudah Mengalami Resesi?

Apakah yang dimaksud dengan resesi? Resesi merupakan kondisi dalam suatu siklus bisnis (*business cycle*). Menurut Burns dan Mitchell (Moore, 1967), siklus bisnis merupakan fluktuasi aktivitas ekonomi agregat. Suatu buku teks pengantar ilmu ekonomi (Parkin, 2016) mendefinisikan resesi sebagai penurunan PDB riil atau pertumbuhan negatif dalam suatu periode, minimal dua triwulanan berturut-turut. Menariknya, masih dalam buku yang sama, dalam gambar 21.6, yang menggambarkan siklus bisnis Amerika Serikat dari tahun 2004 hingga tahun 2014, resesi terjadi dari tahun 2008 hingga pertengahan 2009. Pada keadaan resesi tersebut, pertumbuhan ekonominya masih positif, belum negatif.

Kembali pada definisi yang dikemukakan Parkin di atas. Definisi tersebut berasal dari *National Bureau of Economic Research* (NBER), lembaga penelitian ekonomi independen di Amerika Serikat (Parkin, 2016; Keybridge Research, 2008). NBER (Parkin, 2016; Keybridge Research, 2008; NZIER, 2019) mendefinisikan resesi sebagai suatu periode penurunan PDB riil, pendapatan, tenaga kerja, produksi industri dan perdagangan secara signifikan, yang biasanya berlangsung dari enam bulan hingga satu tahun, dan ditandai oleh kontraksi pada banyak sektor ekonomi.

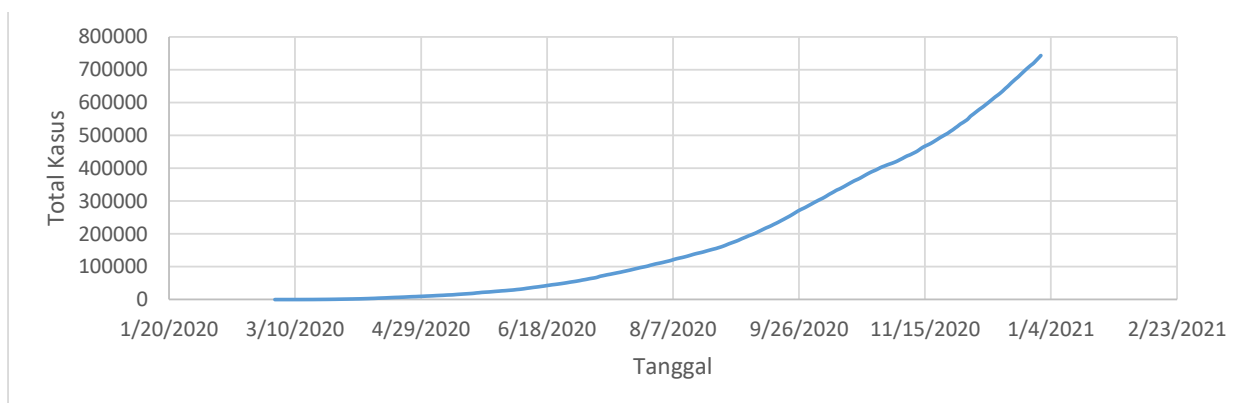
Sebagai informasi (Keybridge Research, 2008), kondisi resesi di Amerika Serikat dinyatakan secara resmi oleh suatu komite yang terdiri dari tujuh profesor ekonomi pada komite *Business Cycle* di NBER. Komite melihat resesi dalam waktu bulanan, bukan triwulanan. Komite pakar tersebut memperhatikan data empat *series* publikasi bulanan untuk menentukan apakah terjadi resesi atau tidak. Data PDB riil dipublikasi dalam triwulanan, sedangkan data lainnya dipublikasi dalam bulanan. Komite mungkin saja mengumumkan negara dalam kondisi resesi apabila menyimpulkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan dalam indikator bulannya, meskipun indikator triwulan PDB masih menunjukkan tanda positif. NBER (Danziger, 2013) menamakan resesi dari bulan Desember 2007 hingga Juni 2009 sebagai resesi besar (*great recession*) karena resesi tersebut dianggap resesi terparah sejak depresi besar (*great depression*) pada tahun 1930-an.

Berdasarkan pada uraian di atas, tampaknya banyak negara mengacu pada definisi yang dibuat oleh NBER dalam menetapkan suatu resesi bagi negaranya. Pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi bahwa ekonomi Indonesia mengalami resesi pada saat BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2020, sekitar -3,49% (Fauzia, 2020).

Namun, dalam implementasinya, keputusan negara seperti Amerika Serikat menetapkan bahwa terjadi kondisi resesi tidak dipegang secara mutlak. Komite atau tim yang menetapkan kondisi resesi dimungkinkan untuk menyatakan resesi dengan pertimbangan lain di luar ketentuan pertumbuhan ekonomi harus negatif dalam dua triwulan. Selain itu, penilaian kondisi resesi juga tidak harus diputuskan dalam triwulanan sesuai publikasi data PDB. Mereka dapat memutuskan dalam hitungan bulanan apabila disimpulkan bahwa perekonomian mengalami penurunan aktivitas yang signifikan dalam kurun empat bulan berturut-turut. Terakhir, penentu bahwa suatu perekonomian mengalami resesi dilakukan oleh pihak independen, bukan pemerintah. Hal terakhir ini lah yang memungkinkan komite atau tim penilai tersebut lebih mudah mengambil keputusan karena tidak memiliki kepentingan pribadi. Apabila pihak pemerintah yang menetapkan, maka mungkin saja terjadi konflik kepentingan karena kekhawatiran bahwa dirinya dianggap gagal mengelola perekonomian.

Keengganan untuk menyatakan bahwa kondisi sudah resesi, padahal kondisinya sudah resesi dan masyarakat juga sudah merasakan dampak resesi, maka akan menimbulkan kebingungan dan

ketidakpastian bagi masyarakat mengenai kondisi ekonominya. Pandemi covid-19 menciptakan resesi. Penawaran tenaga kerja berkurang oleh hambatan mobilitas dan oleh upaya untuk mencegah kematian dan sakit akibat covid-19 (Olivia, Gibson & Nasrudin, 2020). Kebijakan pemerintah menjadi kontradiktif. Di satu sisi menyatakan belum resesi, namun kebijakan yang dilakukan merupakan kebijakan yang biasa dilakukan dalam kondisi resesi. Ketidakjelasan kondisi yang dihadapi bukan hanya dihadapi oleh masyarakatnya, namun juga dapat dihadapi oleh aparat pemerintah juga. Pada gilirannya, perilaku masyarakat dan aparat pemerintah juga menjadi tidak jelas sehingga sikapnya menjadi tidak sesuai dengan keadaan resesi. Tidak ada komitmen dan kesadaran bersama untuk mengatasi resesi. Hal tersebut dapat dilihat dari tulisan Sparrow, Dartanto & Hartwig (2020). Pengumuman Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa Indonesia akan masuk pada kondisi normal baru (*new normal*) tidak didukung dengan langkah strategi yang jelas. Kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada bulan Juni untuk mendorong pemulihan ekonomi diterapkan pada kondisi yang masih belum mampu mengendalikan penyebaran Covid-19. Selain itu, kebijakan kesehatan publik masih fokus pada mengatasi penyebaran virus yang bersifat jangka pendek daripada menurunkan tingkat penyebaran virus. Ketika banyak negara di Asia dan Eropa Barat memberlakukan kebijakan yang lebih ketat untuk menghindari gelombang kedua Covid-19, Indonesia masih fokus pada gelombang pertama. Di bawah ini merupakan gambaran (gambar 1) bahwa total kasus covid-19 tahun 2020 belum menunjukkan pola yang melandai.



Gambar 7. Distribusi Pengeluaran Penduduk dan Gini Ratio

Sumber: Our World in Data (<https://ourworldindata.org/coronavirus/country/indonesia>)

Data-data atau indikator ekonomi yang sebenarnya menunjukkan resesi apabila semakin diabaikan, maka akan membuat indikator tersebut semakin lama, semakin tidak dilihat sebagai peringatan dini. Ketika peringatan dini tersebut terus diabaikan, maka kebijakannya belum tentu tepat karena keputusannya tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal masa ini istilah *big data* semakin mencuat, namun keengganan menggunakan data yang benar dan realistis, akan membawa pada perencanaan yang tidak realistis juga.

Secara menarik, Samuelson (2011) memberi komentar mengenai respons pemerintah atau regulator terhadap resesi. Menurutnya, masalahnya bukan pada tidak ada regulasinya, melainkan bahwa regulator belum tentu lebih paham daripada yang mau diatur. Mungkin ini yang perlu disadari oleh pemerintah agar kebijakannya tidak membawa keadaan yang lebih buruk dan tidak membingungkan serta melunturkan kepercayaan masyarakat. Pernyataan Samuelson tersebut relevan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2020, yakni masa pandemi Covid-19.

4. KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 adalah 5,02% dan tahun 2020 adalah – 2,07% (tabel 1). Pada tahun 2019, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif; sedangkan pada tahun 2020, hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif, kecuali di pertanian, kehutanan dan perikanan; dan jasa. Kinerja perekonomian tahun 2020 tersebut berpengaruh pada pasar tenaga kerja dan kemiskinan. Tingkat pertumbuhan pengangguran naik dari 0,42% (2019) menjadi 37,61% (2020). Atau, kalau dalam nilai absolut, jumlah angkatan kerja yang menganggur naik dari 0,03 juta orang (2019) menjadi 2,67 juta orang (2020). Pekerja formal mengalami pertumbuhan negatif, yakni, – 10,62%. Persentase pekerja informal terhadap total pekerja meningkat dari 55,89% (2019) menjadi 60,47% (2020). Dari segi kemiskinan, terjadi peningkatan jumlah orang miskin dari 24,74 juta (2019) menjadi 27,55 juta (2020). Atau, dari segi persentase orang miskin, terjadi peningkatan persentase orang miskin dari 9,22% (2019) menjadi 10,19% (2020).

Pada kuartal III tahun 2020, setelah pertumbuhan Indonesia selama dua kuartal (kuartal II dan kuartal III) mengalami pertumbuhan negatif, Pemerintah mengumumkan kondisi resesi. Pengumuman ini dapat dikatakan terlambat apabila fungsi pengumuman tersebut ingin dijadikan sebagai peringatan kepada pelaku ekonomi karena masyarakat sudah mulai langsung merasakan dampaknya sejak kebijakan pembatasan fisik dan protocol kesehatan diberlakukan di Indonesia.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020a). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I – 2000. *Berita Resmi Statistik* No.39/05/Th. XXIII, 5 Mei 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020b). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II – 2000. *Berita Resmi Statistik* No.64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020c). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III – 2000. *Berita Resmi Statistik* No.85/11/Th. XXIII, 5 November 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020d). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV – 2000. *Berita Resmi Statistik* No.13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Februari. Jakarta: BPS
- Danziger, S. (2013). Introduction: Evaluating the Effects of the Great Recession. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. November. Vol. 650.
- Fauzia, Mutia .(2020). “Indonesia resmi Resesi, Ekonomi kuartal III-2020,minus 3,49 persen”. [Kompas.com](https://www.kompas.com).05/11/2020)
- Keybridge Research. (2008). The Definition of “Resarch”. *Key Insights*. December.
- Gibson, J., & Olivia, S. (2020). Direct and indirect effect of covid-19 on life expectancy and poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 325-344.
- Moore, G.H., (1967). What is a Recession? *The American Statistician*. Oct. vol. 21. No. 4.
- New Zealand Institute of Economic Research (NZIER). (2019). Recession: what are the chances? *NZIER Insight* 83/2019.
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the time of covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143-174.

Parkin, Michael, (2016). *Economics*. Essex: Pearson

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Samuelson, R.J. (2011). Rethinking the Great Recession. *The Wilson Quarterly*. Winter.

Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R., (2020). "Indonesia under the New Normal: Challenges and the Way Ahead". *Bulletin of Indonesia Economic Studies*. Vol. 56, No. 3. December.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the impact of covid-19 on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175-192.